

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan yang terjalin antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik) ketika agen dan prinsipal tersebut terikat dalam suatu kontrak. *Agent* terikat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi pemilik. Pemilik terikat kontrak untuk memberi imbalan kepada *agent*. Para pemilik disebut evaluator informasi yang bertanggung jawab untuk memilih sistem informasi sedangkan *agent* disebut sebagai pengambil keputusan. Para pemilik harus memilih sistem informasi yang sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik berdasarkan informasi yang dimiliki oleh agen-agen tersebut (Hendriksen and Breda, 2000).

Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai *bargaining position*. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, namun agen

tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, yang bersifat strategis, jangka panjang, dan global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan tersebut tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan (Arifin, 2005).

Dalam konsep *agency theory* manajemen sebagai agen seharusnya *on behalf of the best interest of shareholders*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut *agency problem* (Kholmi, 2010).

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya manajemen laba. Sebagai agen, manajemen bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik saham dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Sebagaimana pengelola perusahaan, manajemen perusahaan akan mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik, hal ini akan memberikan kesempatan kepada manajer

untuk melakukan manajemen laba, sehingga akan menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sudiyanto, 2016).

Auditor merupakan pihak yang dianggap mampu menghubungkan kepentingan pihak prinsipal dan agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen agar manajemen menyajikan informasi secara akurat dan terbebas dari praktik kecurangan akuntansi (Kono dan Yuyetta, 2013). Teori keagenan menjelaskan bahwa seorang auditor dengan kualitas audit yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Becker et al., 1998).

Dewan komisaris independen memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan bahwa teori keagenan mendukung pernyataan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan, maka dewan harus didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan (*outsider*). Beberapa pendapat menyatakan bahwa direktur non-eksekutif diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi perilaku manajemen yang bertindak *opportunistic*.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi

yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Prastiti, 2013).

Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Dalam kerangka *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*. Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* (Sutojo dan Aldridge, 2005). Keputusan yang akan diambil manajemen akan berbeda jika dalam suatu perusahaan manajer bertindak sebagai manajemen dan juga sebagai pemegang saham. Manajemen akan bertindak untuk menselaraskan kepentingannya (sebagai manajer) dan juga kepentingannya sebagai pemegang saham (Nugroho, 2015). Dengan meningkatkan kepemilikan manajerial, perusahaan akan dapat meminimalisir berbagai masalah terutama masalah keagenan (*agency problem*).

Dalam teori keagenan kepemilikan institusional sebagai agen yang mampu mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui pasar atas pengumuman laba.

2. Teori Akuntansi Positif (TAP)

Teori akuntansi positif (TAP) menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu

peristiwa. Teori akuntansi positif (TAP) bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam TAP didasarkan pada proses kontrak (*contracting process*) atau hubungan keagenan antara manajer dengan pihak lain seperti investor, kreditor, auditor, dan pemerintah.

Watts dan Zimmerman (1986) yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Teori ini memprediksi adanya tiga hipotesis yang mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba.

a. Hipotesis Rencana Bonus (*bonus plan hypothesis*)

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer pada perusahaan dengan *bonus plan* cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan *income* saat ini, karena bonus akan diberikan kepada manajer apabila target laba yang ditetapkan pemilik dapat dipenuhi.

b. Hipotesis Hutang/Ekuitas (*debt / equity hypothesis*)

Debt/equity hypothesis menyebutkan bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt/equity* besar maka manajer perusahaan tersebut

cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan maupun laba. Metode yang biasa digunakan manajer terdiri dari dua kebijakan kejadian dalam pemilihan kebijakan akuntansi, yaitu pada saat diadakannya perjanjian hutang dan pada saat jatuh temponya hutang.

c. Hipotesis Biaya Politik (*political cost hypothesis*)

Political cost hypothesis menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Dalam teori agensi (*agency theory*), perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar melakukannya sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Perusahaan besar menghadapi biaya politik yang lebih besar karena merupakan entitas yang banyak disorot oleh publik secara umum.

Manajer mempunyai alasan kenapa mereka melakukan manajemen laba, tetapi dapat diketahui dari alasan tersebut bahwa manajer ingin membuat suatu keputusan *opportunis*, yaitu menguntungkan suatu pihak khususnya manajer.

3. Kantor Akuntan Publik

Definisi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dijelaskan dalam PMK No. 17/PMK.01/2008 adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Bidang jasa yang

diberikan oleh KAP adalah atestasi dan non-atestasi. Jasa atestasi meliputi audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma dan *review* atas laporan keuangan. Adapun jasa yang diberikan KAP yaitu non-atestasi antara lain berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Sedangkan pengertian Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut PMK No. 17/PMK.01/2008 Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Menurut DeAngelo (1981) menyatakan bahwa auditor dalam skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Di Indonesia terdapat *Big Four* yaitu empat kantor akuntan publik yang dianggap memiliki reputasi paling baik. KAP *Big Four* dan afiliasinya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) PriceWaterhouseCoopers (PWC)

PriceWaterhouseCoopers merupakan salah satu anggota dari *Big Four*. Di Indonesia, PWC berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

2) Deloitte

Deloitte Touche Tomatsu Limited, atau sering disingkat dengan Deloitte merupakan salah satu anggota dari *Big Four*. Di Indonesia, Deloitte berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio.

3) Ernst & Young (EY)

Ernst & Young merupakan salah satu anggota dari *Big Four* dan berada diposisi ketiga diantara *Big Four*. Di Indonesia, EY berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman & Surja.

4) KPMG

KPMG merupakan salah satu anggota dari *Big Four* dan berada diposisi keempat diantara *Big Four*. Di Indonesia, KPMG berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja.

4. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau demi kepentingan perusahaan. Untuk lebih memantapkan efektivitas Komisaris Independen, jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang (Susilo, 2010).

Menurut Antonia (2008) dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan pengesahan (*ratification*). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa pengendalian keputusan yang efektif merupakan fungsi positif dari rasio dewan komisaris eksternal dengan total keanggotaan dewan komisaris. Tujuan dari aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris eksternal adalah untuk memberikan *signal* kepada pasar mengenai reputasi aktivitas pengawasan yang efektif didalam perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Antonia, 2008).

Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan

perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris (Kusumaning, 2004).

Untuk memastikan Komisaris Independen dapat menjalankan tugasnya secara independen menurut *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia (2006), Komisaris Independen harus memenuhi kriteria formal sebagai berikut :

- 1) Mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit.
- 3) Tidak pernah dipidana karena merugikan keuangan negara.
- 4) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
- 5) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
- 6) Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

- 7) Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
- 8) Tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- 9) Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- 10) Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
- 11) Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Kriteria formal Komisaris Independen setidaknya harus mengerti mengenai bidang hukum, tidak pernah merugikan negara, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau komisaris lainnya, bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir demi kepentingan perusahaan, serta memahami peraturan PT, UU, Pasar Modal (Susilo, 2010).

5. Komite Audit

Komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balance*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI, 2010).

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas audit laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengawasan internal yang memadai (Sulistyanto, 2008). Keberadaan komite audit bermanfaat dalam menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi *stakeholder* dan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen (Nabila dan Daljono, 2013).

Berdasarkan Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Seperti dewan komisaris, komite audit melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan (Shita, 2015). Ukuran komite audit menunjukkan jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan baik. Dengan adanya komite audit yang independen praktik manajemen laba dapat dieliminasi (Shah, Zafar, dan Durrani, 2009).

Menurut Pamudji dan Trihartati (2010), keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan komite audit di Indonesia dipertegas dengan keputusan Bapepam yang dituangkan dalam SE BAPEPAM No.03 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit. Namun, keberadaan komite audit saja belum cukup untuk menghindarkan perusahaan dari kasus-kasus keuangan terutama kasus manajemen laba.

Komite audit dapat diukur dengan melihat jumlah komite audit (ketua dan anggota) dari setiap perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Komite audit dihitung dengan rumus :

$$Komite\ Audit = \Sigma Anggota\ Komite\ Audit$$

6. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Dalam kerangka *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*. Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*.

Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham (Susilo, 2010). Menurut Jensen dan Meckling (1976) (dalam Susilo, 2010) kepemilikan manajerial menjadi isu penting dalam teori keagenan (*agency theory*) bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah

dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan renumerisasi guna mengurangi masalah keagenan. Mereka menjelaskan bahwa kompensasi tetap berupa gaji, tunjangan, dan bonus terbukti dapat digunakan sebagai sarana untuk menyamankan kepentingan manajerial sebagai pemegang saham.

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan (Boediono, 2005). Keikutsertaan manajer dalam persentase kepemilikan perusahaan akan mendorong manajer untuk meningkatkan nilai perusahaannya, sebab manajer selain sebagai agen juga sebagai prinsipal di dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang sebagaimana mestinya sehingga manajemen laba oleh pihak manajer dapat terminimalisir (L. Mamu dan Damayanthi, 2018).

Menurut Abdillah dan Purwanto (2016), kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen (direktur dan komisaris).

$$MO = \frac{\text{Jumlah lembar saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total lembar saham yang beredar}} \times 100\%$$

7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase jumlah kepemilikan institusional terhadap jumlah saham secara keseluruhan (Astuti, 2005). Menurut

Sudiyanto (2016), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Kepemilikan institusional memiliki arti yang sangat penting dalam mengendalikan manajemen karena adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan wawasan yang lebih optimal. Dengan begitu tentunya dapat menjamin kemakmuran untuk para pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai *agent* pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Para investor institusional memiliki sumber daya, kesempatan serta kemampuan guna melakukan penertiban, pengawasan serta mempengaruhi manajer perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen (Zakia, Diana, dan Mawardi, 2019).

Kepemilikan institusional mampu menyelaraskan berbagai kepentingan dalam perusahaan dan menjadi mekanisme pengawasan dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan keikutsertaan institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan investasi, atau perusahaan asuransi dalam kepemilikan saham perusahaan (L. Mamu dan Damayanthi, 2018). Investor institusional dianggap sebagai investor yang cerdas (*shopisticated*) sehingga dapat melakukan fungsi *monitoring* secara lebih efektif dan tidak percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer seperti tindakan manajemen laba. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol

manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* (Saffudin, 2011).

Menurut Saffudin (2011), kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus :

$$IO = \frac{\text{Jumlah lembar saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

8. Manajemen Laba

Sudiyanto (2016) menyebutkan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Menurut Scott (dalam Antonia, 2008) manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan metode akuntansi.

Menurut Widyaningdyah (2001), manajemen laba dapat didefinisikan menjadi, definisi sempit dan definisi luas, yaitu :

a. Definisi Sempit

Earnings Management (manajemen laba) dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen lab dalam artian sempit

ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*.

b. Definisi Luas

Earnings Management (manajemen laba) merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Informasi *earnings* sebagai salah satu elemen informasi akuntansi merupakan informasi yang berkualitas apabila menyajikan informasi yang relevan, netral, lengkap (komprehensif), tepat waktu dan memiliki daya banding serta daya uji. Informasi akuntansi harus dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang akan menggunakannya dan bebas dari ketergantungan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Informasi laba tentu juga harus komprehensif untuk mengungkapkan semua fakta baik transaksi maupun peristiwa yang dialami perusahaan selama satu periode (Shita, 2011).

Untuk dapat menyajikan informasi dengan kriteria tersebut akuntansi menyediakan standar yang harus diikuti dan dipakai untuk menyusun laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan mempunyai daya banding dan daya uji serta dapat dimengerti oleh pihak lain yang menggunakan laporan keuangan (Sulistyanto, 2008). Dengan demikian, informasi laba (*earnings*) memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tersedia tepat waktu.

Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi tertentu oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu (Scott, 2015). Konsep manajemen laba ini sesuai dengan pendapat Davidson, Stickney, dan Weil yang menyatakan manajemen laba merupakan suatu proses pengambil langkah tertentu yang sengaja dalam batas Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan. Definisi tersebut menunjukkan manajemen laba sebagai aktivitas yang biasa dilakukan manajer dalam menyusun laporan keuangan. Upaya rekayasa manajerial ini dianggap wajar dan bukan merupakan suatu pelanggaran atau kecurangan karena dilakukan dalam ruang lingkup prinsip akuntansi (Sulistyanto, 2008).

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiner*, manajemen laba didefinisikan sebagai suatu kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

Healy dan Wahlen (1998) menyatakan manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Manajer melakukan manajemen laba dengan memilih metode atau

kebijakan akuntansi tertentu untuk menaikkan atau menurunkan laba. Manajer dapat menaikkan laba dengan menggeser laba periode ini ke periode berikutnya.

Berikut adalah macam – macam pengukuran manajemen laba (*earnings management* menurut Suyono (2017) :

a. *Healy Model* (1985)

Healy Model (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual di seluruh variabel pembagian manajemen laba. Total *accruals* (ACC_t) yang mencakup *discretionary* (DA_t) dan *non-discretionary* (NDA_t) *components*, dihitung sebagai berikut :

$$ACC_t = NA_t + DA_t$$

Selanjutnya total accrual diestimasi dengan menghitung selisih antara laba akuntansi yang dilaporkan dikurangi dengan arus kas operasi.

$$ACC_t = -DEP_t - (XIt \times D1) + \Delta AR_t + \Delta INV_t - \Delta AP_t - \{(\Delta TP_t + Dt) \times D2\}$$

Keterangan:

- DEP_t = Depresiasi di tahun t
XIt = Extraordinary Items di tahun t
 ΔAR_t = Piutang usaha di tahun t dikurangi piutang usaha di tahun t-1.
 ΔINV_t = Persediaan di tahun t dikurangi persediaan di tahun t-1
 ΔAP_t = Utang usaha di tahun t dikurangi utang usaha di tahun t-1
 ΔTP_t = Utang pajak penghasilan di tahun t dikurangi utang pajak penghasilan di tahun t-1
D1 = 1 jika rencana bonus dihitung dari laba setelah extarordinary items, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum extarordinary items;

D2 = 1 jika rencana bonus dihitung dari laba sesudah pajak penghasilan, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan

b. *Model De Angelo (1986)*

DeAngelo (1986) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan pertama dalam total akrual, dan dengan mengasumsikan bahwa perbedaan pertama memiliki nilai nol yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada manajemen laba.

$$NDA_t = TA_{t-1}$$

c. *Jones Model (1991)*

Jones (1991) mengusulkan sebuah model yang menyederhanakan anggapan bahwa akrual nondiskretioner bersifat konstan. Modelnya mencoba mengendalikan efek perubahan pada lingkungan ekonomi perusahaan terhadap akrual nondiskretioner.

$$NDA_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t) + \alpha_3 (PPE_t)$$

$$TA_t = a_1 (1 / A_{t-1}) + a_2 (\Delta REV_t) + a_3 (PPE_t) + v_t,$$

d. *Model Industri (1991)*

Dechow dan Sloan (1991) menyusun model pengukuran manajemen laba yang dikenal dengan Model Industry. Serupa dengan Model Jones, Model

Industri menyederhanakan anggapan bahwa akrual nondiskretioner konstan sepanjang waktu. Model Industri untuk akrual nondiskretioner adalah :

$$NDA_t = \gamma_1 + \gamma_2 \text{medianI}(TAt)$$

e. *Modified Jones Model* (1995)

Modifikasi ini dirancang untuk menghilangkan kemungkinan dugaan Model Jones untuk mengukur akrual diskresioner dengan kesalahan ketika diskresi manajemen dilakukan terhadap pendapatan.

- 1) Menentukan nilai total akrual

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

- 2) Menentukan nilai koefisien dari regresi total akrual

$$TAC_{it}/TA_{it-1} = \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2(\Delta REV_{it} / TA_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it} / TA_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

- 3) Menghitung *Nondiscretionary Accruals* (NDAC)

$$NDAC_{it} = \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2\{(\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}\} + \beta_3(PPE_{it} / TA_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

- 4) Menghitung *Discretionary Accruals* (DAC)

$$DAC = (TAC_{it}/TA_{it-1}) - NDAC$$

Keterangan :

- TAC_{it} : Total akrual perusahaan pada tahun t
 NI_{it} : Laba bersih setelah pajak perusahaan i pada tahun t
 CFO_{it} : Arus kas operasi perusahaan i pada tahun t
 TA_{it-1} : Total aset perusahaan i pada tahun t
 ΔREV_{it} : Perubahan total pendapatan pada tahun t
 ΔREC_{it} : Perubahan total piutang pada tahun t
 PPE : *Property, Plant, dan Equipment* perusahaan pada tahun t
 $\beta_1-\beta_3$: Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi
 ε_{it} : *Error term*

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan ringkasan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	Rilla Efriliani Harun (2018), Pengaruh Ukuran KAP, Tenure Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	X : Ukuran KAP, Tenur Audit, Dan Ukuran Perusahaan Y : Manajemen Laba	Ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan sektor konsumsi tahun 2012-2016.
2.	Bayu Adriantama (2014), Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Earning Management</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesta (BEI)	X : Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Y : <i>Earnings Management</i>	Komite audit dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>earnings management</i> . Kepemilikan institusional terbukti positif berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> .
3.	Yunel Fatmawati (2018), Pengaruh Mekanisme <i>Good Coporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)	X : Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Y : Manajemen Laba	Dewan direksi dan ukuran komite tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

No	Peneliti & Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil
4.	Andreani Caroline Barus & Yosephine Natalita Sembiring (2012), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Laba Di Seputar <i>Right Issue</i>	X : Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan Y : Manajemen Laba	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba..
5.	Wisnu Arwinda Irawan (2013), Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2011)	X : Kepemilikan institusional, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, Profitabilitas Y : Manajemen Laba	Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.
6.	Riske Meitha Anggraeni (2013), Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Dan Praktik <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba	X : Struktur kepemilikan, Ukuran perusahaan, <i>Corporate Governance</i> Y : Manajemen Laba	Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

No	Peneliti & Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil
7.	Rafi Ikhsan (2017), Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Kap, Dan Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, Dan Investasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015	X : Ukuran Perusahaan Ukuran KAP, Independensi Komite Audit Y : Manajemen Laba	Variabel ukuran KAP yang diprosikan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP <i>The Big Four</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
8.	Andriana Puspitasari & Yeterina Widi Nugrahanti (2016), Pengaruh Hubungan Politik, Ukuran Kap, dan Audit Tenure Terhadap Manajemen Laba Riil.	X : Hubungan Politik, Ukuran KAP, dan Audit Tenure Y : Manajemen Laba Riil	Variabel Ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba riil yang diukur dengan abnormal CFO.
9.	Yohanes Teofilus L. Mamu & I Gusti Ayu Eka Damaiyanthi (2018), Moderasi Kualitas Auditor Terhadap Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Pada Manajemen Laba	X : Leverage, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Y : Manajemen Laba Z : Kualitas Auditor	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada manajemen laba. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada manajemen laba.

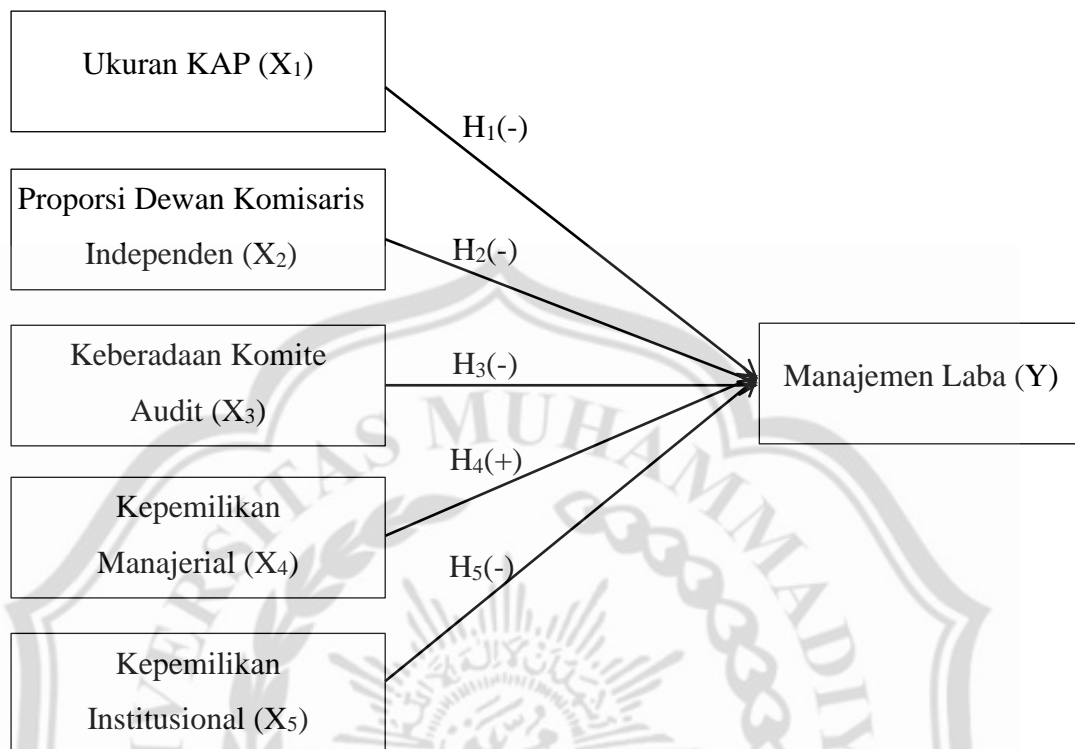
No	Peneliti & Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil
10.	Kartika Widya Tri Dewanti & I Gusti Ngurah Agung Suaryana (2018), Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Price to Book Value</i> Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	X : Kepemilikan Institusional & Kepemilikan Manajerial Y : <i>Price to Book Value</i> Z : Manajemen Laba	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Price to Book Value</i> (PBV). Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap PBV..
11.	Linda Kusumaning (2004), Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba Pada Perusahaan Publik Di Indonesia	X : Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Y : Aktivitas Manajemen Laba	Proporsi dewan komisaris bersama dengan keberadaan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Interaksi direksi dan keberadaan komite audit memiliki pengaruh yang positif dan bukan negatif terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial dan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap aktivitas manajemen laba. Auditor terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap aktivitas manajemen laba.
12.	Shah et.al., (2009), <i>Board Composition and Earnings Management an Empirical Evidence Form Pakistani Listed Companies</i>	X : <i>board structure, ownership structure, audit committee independence</i> Y : <i>Earnings Management</i>	Kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba yaitu sebanyak kepemilikan institusional akan menghasilkan laba.

No	Peneliti & Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil
13.	Ebraheem Saleem Salem Alzoubi, (2016), <i>Ownership Structure and Earnings Management: Evidence from Jordan</i>	<p>X : <i>Insider managerial ownership, Outsider managerial ownership, Institutional ownership, External-block holder ownership, Family ownership, Foreign ownership</i></p> <p>Y: <i>Earnings Management</i></p>	<i>the five aspects of ownership structures are effective as monitors of management, which leads to lower earnings management and higher FRQ.</i>

C. Kerangka Pemikiran

Berikut ini kerangka pemikiran mengenai pengaruh ukuran KAP, proporsi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Manajemen Laba

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang dibedakan menjadi KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four* (Zulaikha, 2014). Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. KAP *Big Four* merupakan auditor yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi dibanding dengan auditor KAP *Non-Big four* (Nurina, 2010). Auditor *Big Four* diharapkan lebih bisa mengungkap salah saji material antara pihak manajemen dan pemegang saham. Selain itu, auditor dalam kelompok KAP

Big Four cenderung memiliki auditor yang lebih berpengalaman yang pada gilirannya memiliki kemampuan dalam membatasi besarnya manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan Rahdal (2017), Ikhsan (2017), dan Harun (2018) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin besar KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, maka praktik manajemen laba dalam perusahaan akan semakin kecil.

Sejalan dengan hasil penelitian Boone *et al.*(2010), Paramita (2012), Angraini (2014), dan Zulaikha (2014) yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya klien yang menggunakan KAP *Big Four* jauh lebih baik dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four* dalam mengungkap salah saji pada laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H1 : Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Susilo, 2010).

Xie et al., (2002) menyatakan bahwa peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan yang mencegah manajemen laba. Berdasarkan penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Nabila & Daljono (2013) yang meneliti pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan semakin besar proporsi komisaris independen maka manajemen laba akan semakin berkurang.

Sejalan dengan penelitian terkait dengan proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba. Chtourou, et.al (2001), Kusumaning (2004), Nasution dan Setiawan (2007), Dananjaya dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya proporsi dewan komisaris independen mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H2 : Proporsi dewan komisaris indenpenden berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Keberadaan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), 2010).

Komite audit yang efektif diperlukan dalam pencapaian *Good Corporate Governance*. Ada beberapa manfaat dari pembentukan komite audit dalam perusahaan. Pertama, komite audit melakukan pengawasan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal. Kedua, komite audit melakukan pengawasan independen terhadap pengelolaan perusahaan. Ketiga, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan yang baik dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi manajemen laba (Herianto, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Widiatmaja (2010) Jao dan Pagalung (2011) Ikhsan (2017) yang menunjukkan hasil bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Keberadaan komite audit sangat

penting karena dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani soal pengendalian.

Nasution & Setyawan (2007) menunjukkan bahwa pengaruh negatif signifikan antara komite audit dengan manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit telah berhasil dalam mengurangi praktik manajemen laba perusahaan. Berdasarkan pemaparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H3 : Keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ogbonnaya, et.al. (2016) yang melakukan penelitian pada perusahaan yang berada pada Industri Brewery dan memperlihatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba (*earnings management*). Hal ini sejalan dengan

penelitian Abdillah dan Purwanto (2016), Boediono (2005), Al- Fayoumi *et al.*(2010), serta Liu (2012) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase jumlah kepemilikan institusional terhadap jumlah saham secara keseluruhan (Astuti, 2005). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif terhadap praktik manajemen laba, semakin kecil persentase kepemilikan institusional maka semakin besar pula kecenderungan pihak manajer dalam mengambil kebijakan akuntansi tertentu untuk memanipulasi pelaporan laba (Widyastuti, 2009).

Penelitian yang dilakukan Mahariana & Ramantha (2014), Sumanto *et al.* (2014), serta Purnama (2017), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sejalan dengan penelitian L.Mamu dan Damayanthi (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin kecil persentase kepemilikan

institusional maka semakin besar pula kecenderungan pihak manajer dalam mengambil kebijakan akuntansi tertentu untuk melakukan manajemen laba.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.



